

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Akuntansi

1. Konsep Akuntansi

Akuntansi seringkali dianggap sebagai bahasa bisnis khususnya pengambilan keputusan. Menurut Thomas Sumarsan (2022) Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah aturan-aturan yang perlu dipahami dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai standar yang sama dalam pencatatan sehingga pengolahan data berjalan dengan baik karena ada kesamaan pandangan sehingga dihasilkan laporan keuangan yang rapi, akurat, dan valid.

2. Pengertian Laporan Keuangan

Secara umum laporan keuangan diketahui sebagai suatu hasil proses pencatatan keuangan, mencerminkan prestasi manajemen perusahaan pada suatu periode tertentu (Kartika, 2025). laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menunjukkan keadaan atau kondisi keuangan pada suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. kondisi perusahaan dapat dilihat melalui neraca dalam periode tertentu dan dalam bentuk laporan laba dan

ruginya umumnya laporan keuangan dibuat pada periode (Reza, 2023). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2.2. Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan

1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan (Kementerian Keuangan RI, 2013).

Selanjutnya, PP 58 Tahun 2005 mengemukakan konsep sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

2. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut PP 71 tahun 2010, Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Delapan

prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (Kementerian Keuangan RI, 2013).

2. Prinsip Nilai Historis

Nilai historis lebih dapat diandalkan dibanding penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Prinsip Realisasi

Prinsip ini mengacu pada pengakuan pendapatan dan belanja saat kas di terima atau dikeluarkan, bukan saat transaksi. Ini berarti pendapatan diakui saat kas masuk ke rekening kas umum Negara/daerah atau entitas pelaporan, dan belanja diakui saat kas keluar dari rekening tersebut.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) (Kementerian Keuangan RI, 2013).

5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan

6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa antar periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

LKPD menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan

dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau CALK.

8. Prinsip Penyajian Wajar

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian keadaan tertentu (konservatisme). Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah (Kementerian Keuangan RI, 2013).

3. Jenis Laporan keuangan

Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menurut peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yaitu :

1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut (PSAP, 2010) LRA merupakan bagian dari komponen laporan keuangan yang menyajikan rangkuman sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan aktivitas keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang menyajikan informasi tentang: pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

2). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atau biasa disingkat LP-SAL merupakan laporan yang memuat informasi kenaikan/penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan ini juga menyajikan rangkuman atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga entitas pelaporan harus menjelaskan rincian dari komponen-komponen yang ada di LPSAL ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (PSAP, 2010).

3). Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang memuat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pelaporan pada periode tertentu. Dari laporan ini, kita dapat mengetahui nilai aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dibayar, dan modal yang ada. Laporan neraca membantu manajemen dalam mengambil keputusan dan memahami kesehatan finansial perusahaan (PSAP, 2010).

4). Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit

dari kegiatan nonoperasional jika ada, pos luar biasa jika ada, serta surplus/defisit-LO.

5). Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas adalah komponen laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pemerintah. Laporan ini menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu .

6). Laporan Perubahan Ekuitas

Komponen laporan keuangan ini menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang terjadi pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan rincian angka yang ada laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yang dimaksud yaitu LRA, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), neraca, laporan operasional, LAK, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang harus diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP, 2010)

3. Peranan Laporan Keuangan

Menurut menurut peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a). Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Kementerian Keuangan RI, 2013).

b). Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2013).

c). Transparasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Kementerian Keuangan RI, 2013).

d). Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut (Kementerian Keuangan RI, 2013).

e). Evaluasi Kerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan (Kementerian Keuangan RI, 2013).

4. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan (Syaharman, 2021). Dalam sebuah laporan keuangan tentu terdapat tujuan dari laporan keuangan dan berikut adalah tujuan laporan keuangan (Giam et al., 2021) :

- a). Memberikan informasi terpercaya tentang sumber ekonomi, dan kewajiban dan ekuitas pemerintah
- b). Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

- c). Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- d). Mengungkapkan informasi yang relevan lainnya yang dibutuhkan oleh pemakai laporan
- e). Informasi keuangan yang disajikan akan bermanfaat bila memenuhi kriteria atau standar.

2.3. Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas laporan keuangan daerah merupakan ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan (PSAP, 2010).

Laporan keuangan sektor publik berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta. Pada hakekatnya, laporan keuangan digunakan penggunaannya untuk pengambilan keputusan serta mengadakan evaluasi atas sumber daya yang digunakan. Kualitas laporan keuangan daerah diartikan oleh sebagai suatu proses pencatatan, suatu proses dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas dana publik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Sonya, 2021). Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan harus

dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan informasi lainnya yang bukan merupakan subjek yang diatur dalam pernyataan standar ini. Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Berikut beberapa indikator kualitas pelaporan keuangan, termasuk relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterbacaan (Rompas & Kindangen, 2022)

a). Relevansi

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Relevansi suatu informasi dihubungkan dengan maksud penggunaan dan harus tepat waktu. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu (Virgilia Hildagard et al., 2023).

b). Keandalan

Informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Virgilia Hildagard et al., 2023)

c). Keterbandingan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Tujuannya, agar Anda bisa mengidentifikasi perkembangan atau penurunan keuangan dan kondisi perusahaan, sehingga lebih mampu menggambarkan prospek ke depannya untuk memudahkan pembaca dalam membandingkan laporan keuangan sekarang dengan periode sebelumnya (Virgilia Hildagard et al., 2023).

d). Keterpahaman

Laporan keuangan juga harus disiapkan dengan cara yang dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan, terlepas dari latar belakang akuntansi mereka. Laporan keuangan dapat dibuat lebih mudah dibaca dengan menggunakan bahasa yang jelas, tabel yang sederhana, dan struktur yang logis (Virgilia Hildagard et al., 2023).

2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebagai Berikut :

1).Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Merupakan faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dipisahkan dari organisasi, Lembaga dan

Perusahaan. Pada hakikatnya Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang dipekerjakan disebuah organisasi, institusi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dikelola, dilatih, dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi dan pelatihan SDM di bidang akuntansi dan keuangan sangat penting (Arza et al., 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah pegawai pengelolaan keuangan di pemerintah daerah memiliki kompetensi yang memadai untuk kualitas laporan keuangan.

2). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP merupakan sebuah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan serta pelaporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, SAP merupakan persyaratan dengan pengaruh hukum internal Upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005). Penerapan standar akuntansi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi kriteria kualitas seperti relevansi, keandalan, dan keterbandingan (Pemerintahan, 2020).

3). Sistem Informasi Akuntansi Daerah

Sistem Informasi Akuntansi Daerah merupakan suatu sistem dari suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan guna membantu manajemen dalam pembuatan keputusan (Seri Mulyani & Rahmat Daim Harahap, 2023). Sistem

informasi akuntansi daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara meningkatkan akurasi, efisiensi, transparansi, dan integritas data. Penerapan SIA yang efektif tidak hanya membantu dalam penyusunan laporan yang lebih baik, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.

4). SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola data dan informasi keuangan daerah. SIPD juga diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 September 2019. SIPD bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan administrasi dan informasi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). SIPD dapat menjadi alat penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, SIPD menjadi sumber data untuk menganalisis kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah.

2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, perlu adanya jurnal dari penelitian-penelitian yang diambil dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi dan acuan dalam membuat penelitian ini. Tujuan

dari adanya referensi penelitian terdahulu ini yaitu untuk menghindari adanya duplikasi dan penelitian yang sama dengan yang dibuat oleh peneliti sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Sukran et al., 2020)	Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Metode analisis deskriptif kualitatif.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan telah memenuhi unsur-unsur kualitatif yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai sejak tahun 2015 juga berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan.
2	(Khadafi, 2022)	Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Hasil Penelitian Laporan Keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pinrang

	Kabupaten Pinrang	memenuhi syarat untuk dikatakan berkualitas sebab telah memenuhi 3 syarat utama yaitu diakuntansikan dengan benar, dilaporkan secara lengkap dengan memenuhi syarat 1) Relevan 2) Andal 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami, dan diaudit secara independen.
3	(Malikah & Rani, 2021)	Analisis Kualitas SDM, Pengelolaan Keuangan, dan Kualitas Laporan Keuangan Di DINPERKIM Kota Magelang
	Metode Kualitatif bersifat Deskriptif	Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa adanya sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelangmenerapkan SAP dengan cukup baik dilihat dari keterandalan pengelolaan keuangan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

4	(Rompas & Kindangen, 2022)	Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado	kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado adalah andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
5	(Rahmattuwoh et al., 2024)	Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Puskesmas Bantargadung	kualitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Bantargadung telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangannya

Sumber : Berbagai jurnal penelitian, 2025.